

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan upaya dalam mewujudkan suatu tujuan dari negara. Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional bukan hanya sebagai tugas pemerintah, pemerintah hanya mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini dilaksanakan langsung oleh masyarakat dari tingkat global sampai tingkat terkecil yaitu masyarakat desa.

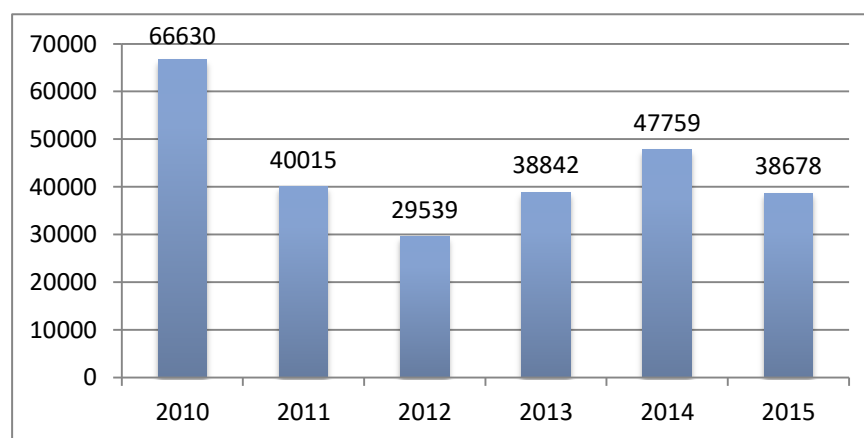
Sejak diberlakukannya dana desa pemerintah desa mewajibkan membentuk badan usaha untuk mensejahterakan masyarakat desa. Masyarakat desa dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam mengalokasikan dana desa dengan menggali potensi desa yang akan dikembangkan sebagai badan usaha yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Menurut Nelson, Bryant dan White (1982:206) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi dari masyarakat itu sendiri akan menjadikan masyarakat semakin mandiri tidak selalu tergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah hanya berperan sebagai pengawas lapangan karena badan usaha ini sepenuhnya dikelola oleh masyarakat dan dengan persetujuan pemerintah desa.

Penguatan badan usaha milik desa seperti yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo yang mewajibkan desa untuk menjalankan program prioritas pemerintah. Program tersebut adalah menentukan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades), mengembangkan badan usaha milik desa (BUMDes), membangun embung air desa, dan membangun sarana olahraga desa. Dengan berdasarkan program tersebut, diharapkan desa dapat berkembang dengan sumber daya yang ada.

Wilayah desa memiliki potensi yang begitu besar, sumber daya alam yang melimpah menjadi kelebihan yang dimiliki oleh desa, daerah perdesaan juga sangat cocok digunakan sebagai pemukiman karena dengan sumber daya alam yang melimpah masyarakat dapat mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah. Desa juga dapat membangun sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat desa akan dapat dirasakan jika masyarakatnya mampu bekerjasama dan pemerintah desa yang mampu memfasilitasi masyarakat untuk menggali sumber daya alam yang dimiliki oleh desa yang dapat dikembangkan sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa.

Kondisi masyarakat desa dapat digambarkan sebagai kelompok masyarakat yang sebagian besar kehidupannya bertumpu pada sumber daya alam. Akan tetapi dengan sumber daya alam yang begitu melimpah masyarakat perdesaan tidak dapat di samakan dengan masyarakat perkotaan.

Masyarakat perdesaan dibandingkan dengan masyarakat yang berada diperkotaan sangat berbanding terbalik, daerah perdesaan dengan sumber daya alam yang melimpah namun sumber daya manusia yang dimiliki masih tergolong rendah dan keterbatasan infrastruktur yang masih kurang memadai. Kualitas sumber daya manusia yang rendah dan terbatasnya infrastruktur mengakibatkan masyarakat masih banyak yang menjadi pengangguran.



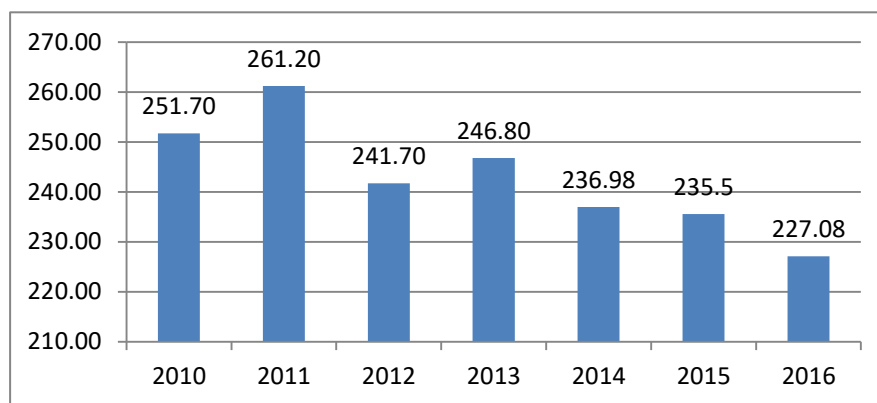
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, diolah

Gambar 1.1.

Data Jumlah Pengangguran Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2015

Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Pemalang setiap tahun mengalami fluktuasi dengan jumlah angkatan kerja tertinggi berada pada tahun 2010 dengan jumlah 66.630 dan jumlah apengangguran terendah terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah 29.539. Dengan adanya data yang seperti itu menunjukkan bahwa jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Pemalang masih cukup tinggi. Padahal jika dilihat sebenarnya Kabupaten Pemalang memiliki sumber daya alam yang melimpah hanya saja lapangan pekerjaan yang disediakan di pemalang memang masih sedikit. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang ada di pemalang

menjadikan masyarakat memilih untuk berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Potensi daerah yang dimiliki tidak membuat masyarakat mampu untuk mengembangkan potensi tersebut. Padahal jika potensi daerah itu dikembangkan oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai peluang usaha untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah, sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada di daerah. Berkurangnya jumlah pengangguran bisa menjadikan tingkat kemiskinan yang terjadi daerah tersebut juga ikut terangkat, karena dapat melihat potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi daerah.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, diolah

Gambar 1.2

Data Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang Tahun 2010-2016

Dari tabel data diatas, terlihat bahwa penduduk miskin di Kabupaten Pemalang setiap tahun mengalami penurunan yang signifikan. Walaupun dengan garis kemiskinan yang setiap tahun mengalami kenaikan. Kemiskinan yang terjadi akan mengakibatkan terlambatnya pembangunan suatu daerah. Penguatan aspek ekonomi sudah seharusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat untuk terus mengurangi kemiskinan. Dengan keadaan yang

seperti ini menjadikan masyarakat susah untuk berkembang. Masalah kemiskinan seperti itu yang menjadikan pemerintah pusat lebih memfokuskan pembangunan di wilayah daerah khususnya pada daerah pedesaan. Pemerintah mampu mengetahui titik celah dari masalah yang ada pada setiap desa serta kemudian langsung bertindak mencari solusi untuk dapat mengurangi kemiskinan dengan fokus dalam meningkatkan ekonomi masyarakatnya dengan mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh daerah. Potensi daerah yang begitu banyak dapat dikembangkan lagi melalui unit yang lebih kecil yaitu desa.

Pemerintah desa dapat membentuk suatu badan usaha yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa presiden mewajibkan setiap desa menjalankan program prioritas seperti salah satunya adalah membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang modalnya berasal dari kekayaan desa itu sendiri seperti pertanian, pariwisata, perkebunan, perdagangan, industri rumah tangga, dan lain sebagainya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga desa yang dikelola langsung oleh pemerintahan desa dan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan potensi desa. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 1 disebutkan “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Dijelaskan juga bahwa tujuan didirikannya BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama dalam bidang perekonomian. Dalam meningkatkan

pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDesa pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yaitu pada Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Pasal 78 tentang desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2) Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Pengelolaan dalam BUMDes itu sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa tersebut, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Kinerja dari BUMDes itu sendiri yaitu dengan menampung kegiatan ekonomi masyarakat dalam suatu kelembagaan ataupun badan usaha yang dikelola secara professional sesuai dengan potensi desa yang ada. Dengan adanya BUMDes dapat menjadikan berbagai macam potensi desa yang menjadi ciri khas desa yang menjadikan usaha masyarakat desa yang ada menjadi lebih berkembang dan produktif.

BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di desa yang memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi yang pada umumnya. Hal tersebut dimaksudkan agar dengan adanya BUMDes ini mampu memberikan kontribusi yang begitu baik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. BUMDes juga dapat menjadi instrumen dan dapat mengoptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi yang legal dalam meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama,
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil),
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*),
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar,
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*),
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes,
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut diupayakan tidak akan memberatkan masyarakat, dimana dalam BUMDes ini akan dijadikan sebagai usaha desa dalam menggerakkan perekonomian desa. BUMDes juga tidak hanya melayani anggota masyarakatnya sendiri, akan tetapi juga melayani kebutuhan yang ada diluar desa dengan menetapkan harga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar. Dengan adanya BUMDes dapat memicu semangat kewirausahaan dan kemandirian desa. BUMDes Bulakan Sejahtera

bisa dikatakan masih jalan di tempat karena strategi dari stakeholder desa kurang maksimal.

Desa Bulakan merupakan salah satu dari 12 desa yang ada di Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Jaya. Desa Bulakan terdiri dari 5 dusun yaitu Dusun Bulakan Barat, Dusun Bulakan Timur, Dusun Sawangan, Dusun Dukuh Karang, Dusun. Dengan jumlah penduduk 11.334 jiwa terdiri dari 5.660 jiwa laki-laki dan 5.674 jiwa perempuan dengan 2.715 Kepala Keluarga (KK). Dari masing-masing dusun tersebut pasti memiliki potensi yang beragam. Dengan keberagaman potensi dari masing-masing dukuh ini lah menjadikan salah satu daya tarik pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desa yang ada. Karakteristik dari daerah ini berada pada wilayah dataran tinggi. Sehingga sebagian besar penduduknya memiliki pekerjaan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan sektor wisata.

Desa Bulakan memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama “Bulakan Sejahtera”, didirikannya BUMDes Bulakan Sejahtera bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha pengembangan usaha pada sektor ekonomi produktif industri, perikanan dan pertanian dan perkebunan serta sektor lainnya. Pengembangan usaha tersebut dapat digunakan sebagai tempat peluang usaha bagi masyarakat desa untuk dapat menggali potensi-potensi yang ada di desa.

Menurut AD/ART BUMDes Bulakan Sejahtera memiliki beberapa unit usaha yang sesuai dengan potensi yang ada di Desa Bulakan, antara lain :

(1) Bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi : air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan, dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya, (2) Bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat desa, meliputi : Alat transportasi, perkakas pesta; gedung pertemuan; rumah toko; dan barang sewa lainnya, (3) Usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi : jasa pembayaran listrik, pasar desa; dan jasa pelayanan lainnya, (4) Bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi : pabrik air minum kemasan, hasil pertanian, sarana produksi pertanian; dan kegiatan bisnis produksi, (5) Bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa, (6) Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan, meliputi : desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat, dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Dari beberapa kegiatan unit usaha yang ada di BUMDes Bulakan Sejahtera, pemerintah desa memfokuskan unit desa wisata sebagai unit usaha yang paling utama dikembangkan untuk mensejahterakan masyarakat. Adapun

unit usaha wisata tersebut antara lain kawasan Wisata Brama Kendali, Kalipatah, Bendungan Royom, Bukit Pengungkakan dan Hutan Romantis adalah usaha pengelolaan potensi sumber daya alam yang akan dikembangkan menjadi wisata desa.

BUMDes Bulakan belum mampu berkembang karena baru awal pembentukan. Hal ini sangat disayangkan karena potensi yang dimiliki oleh Desa Bulakan sangat banyak salah satu potensi di Desa Bulakan adalah potensi sumber daya alamnya yang begitu melimpah seperti pada bidang pariwisata. Jika potensi tersebut dikembangkan dengan strategi yang bagus dan tepat maka tingkat ekonomi masyarakat bulakan akan meningkat.

Tabel 1.1.

Matriks permasalahan hasil dari *pra survey* terkait BUMDes Bulakan Sejahtera

Permasalahan BUMDes	Versi Pemerintah Desa	Versi Pengelola BUMDes	Versi Masyarakat
Manajemen	Pengelola BUMDes belum diperi pelatihan yang maksimal	Manajemen pengelolaan BUMDes belum maksimal	Ketidakjelasan koordinasi antara pemerintah desa dengan pengelola.
Ekonomi	Masyarakat masih banyak yang belum mau membuka usaha sendiri	Tidak adanya modal awal	Tidak Ada kejelasan terkaitan pendanaan
Promosi	Belum memaksimalkan memanfaatkan sosial media	Sudah menggunakan media sosial media namun belum maksimal	Belum maksimal karena jika dilihat pengelola masih bingung apa yang harus dipromosikan

Sumber : *pra-survey*, 3 Oktober 2017, diolah

Berdasarkan hasil pra-survey yang telah dilakukan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes Bulakan Sejahtera seperti :

1. Masih kurangnya manajemen dalam pengelolaan BUMDes secara maksimal dan kurangnya koordinasi dengan pemerintah desa.
2. Masyarakat masih belum ada keinginan untuk membuka usaha sendiri dan tidak adanya kejelasan terkait pendanaan.
3. Masih bingung dengan apa yang akan dipromosikan sehingga promosi yang dijalankan kurang maksimal.

Strategi pengelolaan BUMDes Sejahtera terkendala dengan berbagai hal, salah satunya kurang sinkronnya strategi antara pemerintah dengan pengelola BUMDes. Padahal jika pemerintah desa dan pengelola BUMDes dapat berjalan bersama dalam pengelolaan potensi desa maka dapat mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan sebelumnya maka penulis merasa perlu untuk mengangkat sebuah judul dalam penelitian yang berjudul “Strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa (Studi BUMDes Bulakan Sejahtera, Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kabupaten Pematang Jaya)”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Agar penulisan penelitian ini lebih terfokus dan tidak menyimpang dari tujuan awal yang direncanakan, maka penulis membatasi variabel permasalahan yang diangkat. Maka dari itu penulis membatasi diri hanya membahas yang berkaitan dengan strategi pengembangan BUMDes melalui alternatif kebijakan manajemen, ekonomi, dan promosi.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat di Desa Bulakan ?
2. Bagaimana kondisi BUMDes Bulakan Sejahtera?
3. Bagaimana strategi pengembangan BUMDes yang harus diprioritaskan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Bulakan ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat di Desa Bulakan.
2. Untuk mengetahui kondisi BUMDes Bulakan Sejahtera
3. Untuk mengetahui strategi pengembangan BUMDes yang harus diprioritaskan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Bulakan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait bagaimana strategi pengembangan BUMDes yang harus diprioritaskan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap keilmuan yang selanjutnya dapat dikembangkan di Prodi Ilmu Ekonomi UMY
- c. Memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait sejauh mana strategi pengembangan BUMDes yang harus diprioritaskan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa
- d. Mengembangkan teori organisasi masyarakat.

2. Bagi Penulis

- a. Penulis dapat melihat dan dapat menerapkan ilmu yang didapatkan selama menjadi mahasiswa di Ilmu Ekonomi UMY ke dalam sebuah karya ilmiah.
- b. Mengetahui sejauh mana strategi pengembangan BUMDes yang harus diprioritaskan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa.

3. Bagi Desa

- a. Memberikan kontribusi bagi desa untuk dapat melihat sejauh mana strategi pengembangan BUMDes yang harus diprioritaskan dalam menguatkan ekonomi masyarakat desa.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat desa terhadap potensi yang dimiliki oleh desa.